



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2021

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jalan Rajawali No. 7 Joho Sukoharjo. No Telp : (0271) 593037 Website :
www.dishub.sukoharjokab.go.id Email : dishubsukoharjokab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi realisasi kinerja sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Pencapaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 merupakan faktor pendorong yang dijadikan indikator dalam mencapai Indikator keberhasilan Sasaran Strategis Bupati Sukoharjo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016 – 2021.

Selanjutnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan keterbatasan dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Sukoharjo, Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO


Drs. FX. TONSRI BUNTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI				
Kata Pengantar				1
Daftar Isi				2
Bab I	Pendahuluan			3
	A	Latar Belakang	3
	B	Gambaran Umum Organisasi	3
	C	Permasalahan Utama	12
	D	Sistematika Penulisan	13
Bab II	Perencanaan Kinerja		14
	A	Rencana Strategis	14
	B	Rencana Kinerja Sasaran	15
	C	Perjanjian Kinerja	23
Bab III	Akuntabilitas Kinerja		25
	A	Capaian Organisasi	25
	B	Realisasi Anggaran	35
Bab IV	Penutup		42
	A	Tujuan	42
	B	Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	43
	C	Strategi Pemecahan Masalah	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang telah ditetapkan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pelayanan di bidang Perhubungan didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbub Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah :

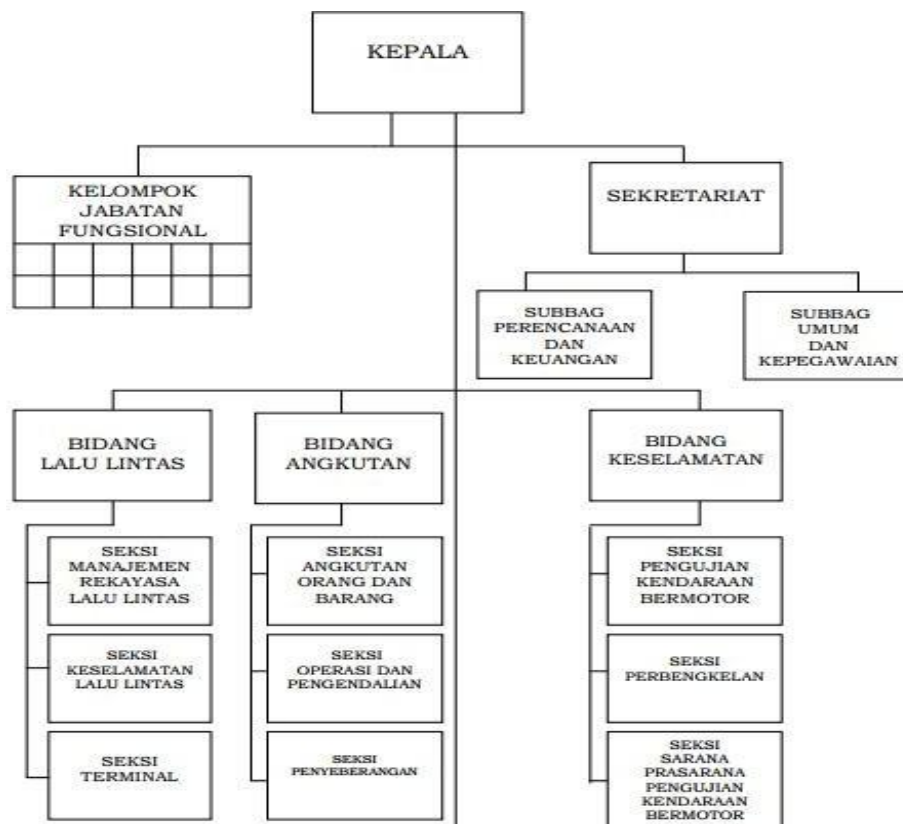
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris Dinas (Eselon III), terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
 - Seksi Terminal.
- d. Bidang Angkutan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - Seksi Penyeberangan.
- e. Bidang Keselamatan (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Seksi Perbengkelan;
 - Seksi Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.



a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;

2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

a.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

a.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang lalu lintas;
2. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan;
3. penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
4. penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal Tipe C;
5. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
6. persetujuan Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan pengusulan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, pemberian rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

b.2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pendidikan ketertiban lalu lintas, penyebarluasan informasi tentang keselamatan lalu lintas, pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam berperan aktif di bidang keselamatan lalu lintas, pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.

b.3. Seksi Terminal

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyusunan rencana kerja terminal, pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai Bahan perumusan kebijakan teknis operasional terminal, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal, pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta

pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal, pemungutan retribusi dan administrasi di terminal, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal, penyetorkan Hasil pemungutan retribusi ke kas daerah, pembinaan pengelolaan ketatausahaan Terminal, pengumpulan Bahan penelitian untuk penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C, penyiapan Bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe C, perencanaan pembangunan terminal angkutan barang, inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

c. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, perencanaan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang angkutan;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
5. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah;

6. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
7. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
8. penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
9. penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang angkutan jalan;
11. penetapan tarif kelas ekonomi utk angkutan orang yg melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.1. Seksi Angkutan Orang dan Barang

Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pencanaan program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum, penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi, rekomendasi perizinan angkutan, penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.

c.2. Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi menyiapkan fasilitas kegiatan operasional dan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, pemeliharaan, pengoperasian fasilitas operasional dan pembina petugas operasional lalu lintas, penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, inventarisasi dan pengolahan data kecelakaan lalu lintas.

c.3. Seksi Penyeberangan

Kepala Seksi Penyeberangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan yang meliputi perencanaan pengadaan pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas penyeberangan.

d. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan bengkel dan karoseri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian di bidang keselamatan transportasi jalan;
2. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang keselamatan transportasi jalan;
3. pengujian berkala kendaraan bermotor;
4. pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keselamatan transportasi jalan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d.1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji, pemeriksaan/uji petik kendaraan bermotor di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan bermotor baru/uji pertama/rubah bentuk sesuai dengan spesifikasinya, pemeriksaan bukti kecelakaan lalu lintas atas permintaan kepolisian, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilelang, inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, penetapan biaya, lokasi dan tempat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualitas teknis guna menentukan wewenang, tanggung jawab penguji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.2. Seksi Perbengkelan

Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan bengkel dan karoseri, pemberian

rekomendasi pendirian bengkel dan karoseri, pengawasan peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan tidak bermotor, registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor.

d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala, kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, pengadaan kelengkapan uji kendaraan bermotor.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan faktor terpenting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Jumlah aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2021 sejumlah 156 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang, Pegawai Honorer sebanyak 11 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas 98 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang, Fungsional Khusus sebanyak 7 orang, dan staf sebanyak 134 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 40 orang, Diploma 3 (D III) sebanyak 9 orang, SMA sebanyak 87 orang, SMP sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 3 orang.

Posisi dan status kepegawaian:

Gambar 1.

NO	POSISI KERJA	STATUS				JUMLAH
		PNS	CPNS	HONORER	THL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	13	-	2	16	31
3	Bidang Lalu Lintas	16	-	1	28	45
4	Bidang Angkutan	6	-	8	45	59
5	Bidang Keselamatan	11	-	-	9	20

Gambar 2.

NO	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	6	40	9	87	11	3	156

4. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali No. 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk administrasi perkantoran dan 1 (satu) gedung induk pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung bengkel perbaikan rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gedung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan operasional terdiri dari 7 (tujuh) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional pemeliharaan dan perbaikan traffic light/ penerangan jalan umum dan 2 (dua) kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 31 (tiga puluh satu) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

Gambar 3.

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Kijang Innova	1	Dinas Jabatan
2	Mobil	Toyota Rush	1	Dinas Jabatan
3	Mobil	Toyota Avanza	2	Dinas Jabatan
4	Mobil	Daihatsu Taruna	1	Dinas Jabatan
5	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
6	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
7	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
8	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	2	Operasional
9	Mobil	Isuzu PS (Mobil Tangga)	1	Operasional
10	Spd Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli
11	Spd Motor	Honda Supra X	7	Dinas Jabatan
12	Spd Motor	Suzuki Thunder	4	Dinas Jabatan
13	Spd Motor	Yamaha Jupiter Z	6	Dinas Jabatan
14	Spd Motor	Yamaha Lexi S	2	Dinas Jabatan

b. Tanah dan Bangunan, terdiri dari :

Gambar 4.

NO	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung Induk	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
2	Gedung Pengujian	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
3	Gedung Pertemuan	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
4	Gedung Bengkel Rambu LL	Jl. Rajawali No. 7	1	Unit
5	Terminal Tipe C Tawang Sari	Jl. Tawang Sari-Weru	1	Unit
6	Terminal Pasar Sukoharjo	Jl. Jendral Sudirman	1	Unit

c. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

Gambar 5.

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Speedometer Tester	1	Baik
2	Break Tester	1	Baik
3	Axle Load	1	Baik
4	Side Slip Tester	1	Baik
5	Head Light Tester	1	Baik
6	Play Detector	1	Baik
7	CO/ HC Tester	1	Baik
8	Smoke Tester	1	Baik
9	Noise Tester	1	Baik

C. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2021, antara lain :

1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
2. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
4. Kurangnya kajian study lalu lintas guna inovasi pelaksanaan urusan bidang perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
6. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
7. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
8. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;

9. Penyesuaian fasilitasi pelayanan di sektor perhubungan dalam masa pandemi covid-19.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 4 (empat) kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan, kurangnya pengelolaan dan kelayakan angkutan umum, belum maksimalnya manajemen pengelolaan rekayasa lalu lintas dan tantangan implementasi kebijakan perhubungan di tengah pandemi covid-19. Pemenuhan sarana prasarana dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/ terminal. Peningkatan pengelolaan angkutan dapat ditindak lanjuti dengan melaksanakan kajian tata pengelolaan dan pengembangan sistem angkutan daerah sedangkan berkaitan dengan peningkatan manajemen pengelolaan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan inovatif pengelolaan lalu lintas berdasarkan kajian-kajian lalu lintas yang telah dilaksanakan. Serta tantangan implementasi kebijakan perhubungan dimasa pandemi covid-19 diantisipasi dengan merubah menyesuaikan implementasi dilapangan berdasar dengan dinamika penyebaran covid-19 yang tentunya selalu sinergis dengan kebijakan dari pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan	:	Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Permasalahan Utama dan Sistematika Penulisan
Bab II	:	Perencanaan Kinerja	:	Rencana Strategis, Rencana Kinerja (RKT 2021), dan Perjanjian Kinerja 2021
Bab III	:	Akuntabilitas Kinerja	:	Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan
Bab IV	:	Penutup	:	Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja dan Strategi Pemecahan Masalah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021, tujuan yang ingin dicapai guna mensukseskan capaian Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 6.

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2021
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi	Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	Kasus	80	140

Guna mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah merumuskan Sasaran Strategis yang akan dicapai dan terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dimana dijadikan acuan Indikator Kinerja Utama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada setiap tahunnya dan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Sasaran strategis guna mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 7.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		2021
1		2		3
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.1.	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	12%
2.	Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi	2.1	Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)	0,61
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	3.1	Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	0,1%

Dalam rangka mencapai indikator-indikator tersebut maka pada tahun 2021 dilaksanakan dengan 4 Program Utama, 20 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan

landasan serta pedoman bagi seluruh aparaturnya dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Renstra yang mampu memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan pembangunan daerah tentu perlu ditunjang dengan tujuan dan sasaran yang rasional dan berkelanjutan. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas kegiatan perekonomian masyarakat semakin cepat dan efisien yang akan memicu percepatan ekonomi daerah serta meningkatkan produktifitas sektor unggulan daerah.

2. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan visi Dinas Perhubungan "Terwujudnya Transportasi yang Handal dan Mensejahterakan" tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan seluruh stake holders.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum;
2. Meningkatkan ketersediaan terminal/shelter serta rambu perlengkapan keselamatan jalan sesuai kebutuhan;
3. Meningkatkan jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji serta meningkatkan pengawasan pengoperasian angkutan untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas angkutan;

3. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektifitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi.

B. Rencana Kinerja Sasaran

1. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sasaran, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 8.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
				2021
1		2		3
1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.1.	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	12%
2.	Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi	2.1	Indeks lalu lintas harian rata-rata (vcratio)	0,61
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	3.1	Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	0,1%

2. Rencana Kinerja Program

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sasaran program, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 9.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
				2021
1		2		3
1.	Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	1.1.	Tingkat ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum	54%
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di bidang perhubungan	2.1	Prosentase ketersediaan rambu fasilitas perlengkapan keselamatan jalan	94%
3.	Meningkatnya keselamatan angkutan	3.1	Tingkat kelayakan angkutan orang dan barang	86%
4.	Meningkatnya kualitas administrasi kinerja dinas perhubungan	4.1	Nilai sakip OPD	65

3. Rencana Kinerja Kegiatan

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 10.

KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengeolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen	100

Lanjutan.

KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengelola Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100

4. Rencana Kinerja Sub Kegiatan

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 10.

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Dokumen	6
5.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5
5.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang	45
5.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan baga aparatur internal perangkat daerah	Orang	20
5.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya laporan akhir tahun	Dokumen	1
5.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	176
5.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	20
5.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	20
5.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peyediaan alat kebersihan	Jenis	20
5.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	76
		Terwujudnya penyediaan makan dan minum bagi pegawai dan tamu kantor	Porsi	2000

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jenis	35
5.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar bagi Pegawai	Exemplar	1080
5.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Kali	15
5.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Buah	14
5.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya fasilitas jasa surat menyurat setahun	Surat	4.500
5.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran fasilitas listrik, air dan telepon	Jenis	3
5.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Buah	4
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Orang	34
5.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Unit	33
5.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	4

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terseleenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	25
5.2.15.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen lalu lintas yang	Kajian	1
5.2.15.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Terwujudnya database keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Dokumen	1
5.2.16.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	Beam	204
5.2.16.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Titik	180
5.2.16.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Traffic light dan warning serta rambu keselamatan jalan berfungsi baik	Unit	1,434
5.2.16.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang layak	m2	8,710
5.2.17.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Lokasi	4
5.2.18.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara perparkiran yang baik	Orang	150
5.2.19.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah pelaku usaha bengkel non ATPM yang telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah disosialisasikan	Bengkel	50
5.2.19.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Unit	9
5.2.19.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengikuti wajib uji kendaraan bermotor	Orang	50

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.19.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji petik	Unit	180
5.2.20.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rambu Keselamatan Jalan yang terpasang	Unit	1.907
5.2.20.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kasus	6
5.2.21.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Bangunan	12
5.2.22.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Kali	152
5.2.22.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Para sopir/jurumudi peserta penyuluhan yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	30
5.2.22.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pengelola Angkutan Umum peserta temu wicara yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	60
5.2.23.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen pengelolaan angkutan yang disusun	Kajian	3
5.2.23.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terudatenya data pokok pelayanan angkutan	Database	1
5.2.25.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan	Kali	207

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.28.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kali	3
5.2.37.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perahu penyeberangan yang berfungsi baik	Unit	1
5.2.58.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Penyeberangan Kereta dalam Kondisi Baik	Titik	7

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Gambar 11.				
SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		2021
1		2		3
1.	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	1.1.	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	12%
2.	Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi	2.1	Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)	0,61
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi	3.1	Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	0,1%

Sedangkan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Kepala Dinas Perhubungan diatas ditindaklanjuti dengan target kinerja program yang menjadi tanggung jawab eselon III sebagaimana berikut :

Gambar 12.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
				2021
1		2		3
1.	Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	1.1.	Tingkat ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum	54%
2.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	2.1	Prosentase ketersediaan rambu fasilitas perlengkapan keselamatan jalan	94%
3.	Meningkatnya keselamatan angkutan	3.1	Tingkat kelayakan angkutan orang dan barang	86%
4.	Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	4.1	Nilai SAKIP OPD	65

Antara RKT dengan PK tidak terdapat perbedaan target kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja yang diukur adalah pencapaian Indikator Sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Hingga akhir tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun capaian rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Gambar 13.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2021	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	Kasus	80	140	94

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/ Perjanjian Kinerja (PK)

Gambar 14.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		2021	
1	2	3	4
1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1.1 Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	12%	12%
2. Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi	2.1 Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)	0,61	0,53
3. Meningkatnya keselamatan transportasi	3.1 Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	0,1%	-31%

3. Rencana Kinerja Program

Gambar 15.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		2021	2021
1	2	3	4
1. Meningkatnya sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah	1.1. Tingkat ketersediaan trayek yang terlayani angkutan umum	54%	56%
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur bidang perhubungan	2.1 Prosentase ketersediaan rambu fasilitas perlengkapan keselamatan jalan	94%	94%
3. Meningkatnya keselamatan angkutan	3.1 Tingkat kelayakan angkutan orang dan barang	86%	87%
4. Meningkatnya kualitas administrasi kinerja Dinas Perhubungan	4.1 Nilai SAKIP OPD	65	68

4. Rencana Kinerja Kegiatan

Gambar 16.

KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengeolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	109,65
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100,51
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	101,08
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Meningkatnya Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persen	100	100

Lanjutan.					
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengelola Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	98,08
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	100	100,87
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	101,93
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	133,33
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapihan Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100

5. Rencana Kinerja Sub Kegiatan

Gambar 17.

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
5.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Dokumen	6	6
5.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	5
5.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang	45	45
5.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan baga aparatur internal perangkat daerah	Orang	20	20
5.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya laporan akhir tahun	Dokumen	1	1
5.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	176	176
5.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis	20	21
5.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	20	20
5.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peyediaan alat kebersihan	Jenis	20	25
5.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	76	76
		Terwujudnya penyediaan makan dan minum bagi pegawai dan tamu kantor	Porsi	2000	2450

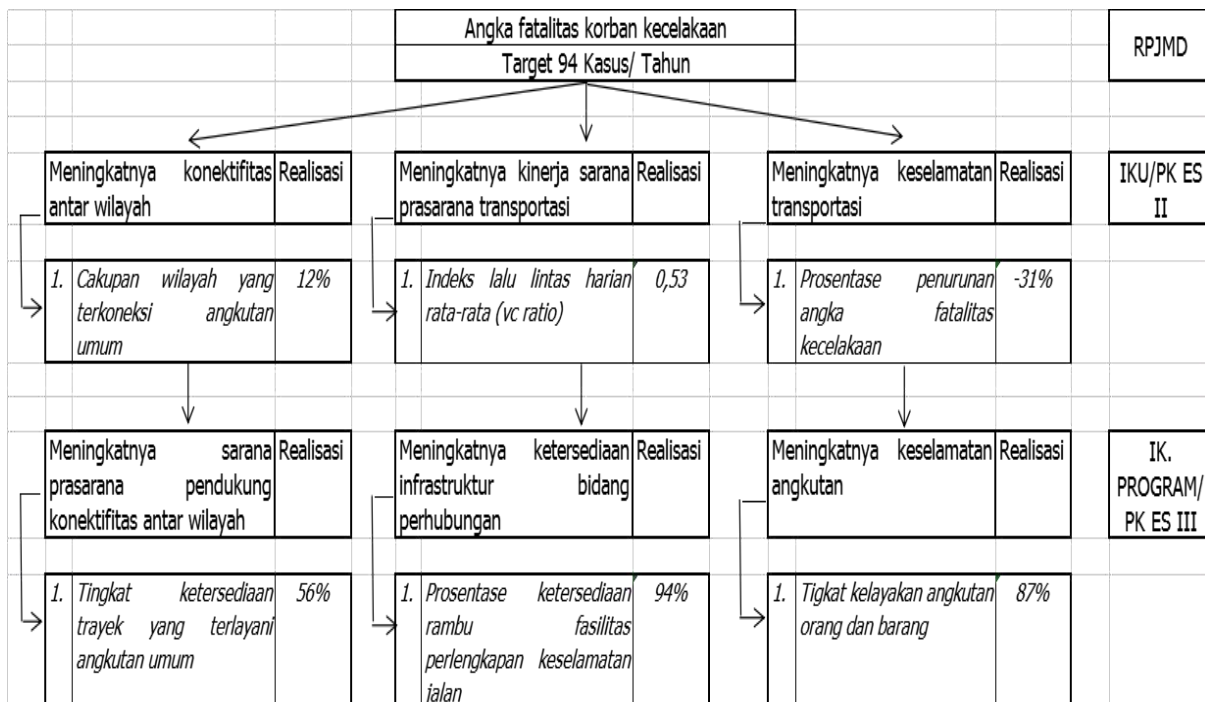
Lanjutan.					
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
5.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jenis	35	35
5.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbelinya Surat Kabar bagi Pegawai	Exemplar	1080	788
5.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	Kali	15	23
5.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terwujudnya Pengadaan Mebeleur	Buah	14	14
5.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya fasilitas jasa surat menyurat setahun	Surat	4.500	5.718
5.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran fasilitas listrik, air dan telepon	Jenis	3	3
5.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	Buah	4	3
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Orang	34	34
5.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Unit	33	33
5.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	4	4

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
5.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terseenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	25
5.2.15.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen lalu lintas yang	Kajian	1
5.2.15.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Terwujudnya database keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Dokumen	1
5.2.16.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	Beam	204
5.2.16.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Titik	180
5.2.16.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Traffic light dan warning serta rambu keselamatan jalan berfungsi baik	Unit	1,434
5.2.16.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Luas marka jalan dan zona aman selamat sekolah yang layak	m2	8,710
5.2.17.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan	Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Lokasi	4
5.2.18.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara perparkiran yang baik	Orang	150
5.2.19.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah pelaku usaha bengkel non ATPM yang telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah disosialisasikan	Bengkel	50
5.2.19.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Unit	9
5.2.19.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengikuti wajib uji kendaraan bermotor	Orang	50

Lanjutan.					
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
5.2.19.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji petik	Unit	180	180
5.2.20.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rambu Keselamatan Jalan yang terpasang	Unit	1.907	1.834
5.2.20.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Kasus	6	6
5.2.21.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Bangunan	12	12
5.2.22.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Kali	152	156
5.2.22.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Para sopir/jurumudi peserta penyuluhan yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	30	30
5.2.22.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pengelola Angkutan Umum peserta temu wicara yang memahami aturan keselamatan penumpang	Orang	60	60
5.2.23.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas kajian manajemen pengelolaan angkutan yang disusun	Kajian	3	3
5.2.23.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terudatanya data pokok pelayanan angkutan	Database	1	1
5.2.25.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan harian dan insidental yang diselenggarakan	Kali	207	211

Lanjutan.					
KODE REKENING	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
5.2.28.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Kali	3	4
5.2.37.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perahu penyeberangan yang berfungsi baik	Unit	1	1
5.2.58.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Penyeberangan Kereta dalam Kondisi Baik	Titik	7	7

Keterkaitan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perhubungan terhadap Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dapat diketahui melalui pola pemikiran sebagai berikut :



Gambaran di atas menjelaskan bagaimana Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berbanding lurus dengan Capaian Indikator Sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sehingga apabila capaian Indikator Kinerja relatif baik maka capaian indikator sasaran akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 yang dijadikan indikator awal dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Gambar 18.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2021	REALISASI
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	Kasus	80	140	94

Indikator Kinerja : **Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)**

Tingkat keberhasilan dari Indikator Sasaran RPJMD tersebut disimpulkan ketika realisasi angka fatalitas korban kecelakaan di bawah dari target nilai yang ditentukan maka capaian indikator tersebut dikatakan berhasil dan begitu juga sebaliknya, sehingga untuk Capaian Keberhasilan Indikator Sasaran RPJMD pada Tahun 2021 bisa dikatakan berhasil karena realisasi angka fatalitas korban kecelakaan dibawah dari target yaitu 94 kasus/tahun dari target 140 kasus/tahun yang telah ditentukan. Realisasi target capaian tersebut tercapai dengan baik didorong dengan belum maksimalnya mobilisasi masyarakat/ masa transisi mobilisasi masyarakat dikarenakan pandemi covid-19, walaupun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka fatalitas yang tercapai cenderung mengalami kenaikan sekitar 31% yaitu dari 65 kasus/ tahun menjadi 94 kasus/ tahun. Hal ini sangat berpengaruh akibat mulai meningkatnya mobilisasi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran aturan mobilitas masyarakat guna menjaga aktivitas perekonomian masyarakat tetap baik dan produktif baik melalui aktifitas di sektor perdagangan ataupun pariwisata.

Tingginya angka kecelakaan yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara meskipun telah didukung dengan prasarana rambu keselamatan yang bagus dan telah termodernisasikan, oleh sebab itu kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan lebih meningkatkan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung ke lingkungan pendidikan/ sekolah, lingkungan pengusaha angkutan, ataupun kepada masyarakat secara keseluruhan baik melalui sarana edukasi umum seperti halnya fasilitas taman lalu lintas dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kondisi budaya berlalulintas yang berkeselamatan dimana telah terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya berkendara sesuai aturan yang berlaku mengingat untuk tahun 2021 sarana sosialisasi face to face tidak dapat terlaksana sehingga untuk bisa di aktifkan kembali di tahun 2022 yang tentunya selalu mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi covid-19 yang terjadi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dijadikan faktor pendorong guna mencapai Indikator Sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 19.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		2021	
1	2	3	4
1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1.1 Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	12%	12%
2. Meningkatkan kinerja sarana prasarana transportasi	2.1 Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)	0,61	0,53
3. Meningkatkan keselamatan transportasi	3.1 Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan	0,1%	-31%

Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 secara umum bisa dikatakan baik dimana indikator indeks lalu lintas harian (vc ratio) melebihi target yang telah ditentukan dan cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum tercapai sesuai target. Akan tetapi apabila dibandingkan tahun sebelumnya khususnya capaian indeks vc ratio mengalami kenaikan walaupun masih tercapai melebihi target yang ada dimana capaian tahun 2020 yaitu 0,43 dan di tahun 2021 yaitu 0,53 selisih 0,1 ini didapatkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat ditengah pelonggaran mobilitas masyarakat guna menopang roda perekonomian yang ada. Sedangkan indikator penurunan angka fatalitas kecelakaan terdampak sangat besar dimana fatalitas kecelakaan justru mengalami kenaikan 31% dari target yang ditetapkan mengalami penurunan sebesar 0,1%. Hal ini juga terpengaruh faktor yang disebutkan di atas, selain itu apabila mengingat capaian yang sangat baik di tahun 2020 yaitu tercapai 32% penurunan angka fatalitas dari target yang ditetapkan 0,1% hal tersebut juga tidak lepas dari faktor pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi covid-19 dan dengan kenaikan yang begitu masif sebesar 31% di tahun 2021 dapat diasumsikan bahwa mobilitas masyarakat sudah kembali berangsur normal. Sehingga target yang tidak tercapai pada indikator penurunan angka fatalitas pada tahun 2021 bisa dimaklumi karena perkembangan dinamika situasi di kejadian luar biasa semacam pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Meskipun demikian hal itu tidak luput menjadi suatu alarm/ peringatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk selalu berinovasi dalam setiap kebijakan yang tentunya pada akhirnya bertujuan untuk sebisa mungkin menekan dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2021, akuntabilitas keuangan dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.265.215.000,00 sedangkan

realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.338.948.800,00 atau dicapai sebesar 103,26%. Hal ini didukung beberapa faktor diantaranya, maksimalnya pendapatan retribusi perparkiran sebagai dampak positif peningkatan potensi perparkiran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan UJI KIR di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang berkendara yang berkeselamatan sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan retribusi di sektor Pengujian Kendaraan Bermotor.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 20.

NO REK	JENIS PAD	TARGET APBD	REALISASI	(KURANG)/ LEBIH	%
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.265.215.000	2.338.948.800	73.733.800	103,26
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.265.215.000	2.338.948.800	73.733.800	103,26
4.1.2.04.01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.006.377.000	1.008.116.300	1.739.300	100,17
4.1.2.06.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.117.680.000	1.215.199.200	97.519.200	108,73

Lanjutan.

NO REK	JENIS PAD	TARGET APBD	REALISASI	(KURANG)/ LEBIH	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.17.01	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.704.000	23.471.300	(27.232.700)	46,29
4.1.2.17.02	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	82.008.000	84.957.500	2.949.500	103,60
4.1.2.17.03	Retribusi Terminal - Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal	1.246.000	769.500	(476.500)	61,76
4.1.2.23.01	Retribusi Penyeberangan di Atas Air	5.000.000	5.000.000	-	100,00
4.1.2.27.01	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.200.000	1.435.000	(765.000)	65,23

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari realisasi anggaran terlihat bahwa pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 37.331.045.950,00 dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 36.006.367.391,00 atau (96,45%), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 1.324.678.559,00 (3,55%). Sisa lebih tersebut secara umum dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran serta adanya beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana dikarenakan masalah teknis pekerjaan ataupun implementasi

kegiatan di tengah pandemi covid-19, sisa anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke kas daerah.

Rincian target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 21.

KODE REKENING	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	58.161.500	89,48
5.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000	53.283.000	88,81
5.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.878.500	97,57
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.292.675.000	3.961.109.384	92,28
5.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.910.725.000	3.680.439.784	94,11
5.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	376.950.000	275.680.000	73,13
5.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.989.600	99,79

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET
1	2	4	5	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.665.000	155.935.500	99,53
5.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.665.000	155.935.500	99,53
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.086.000	435.107.007	95,82
5.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.784.500	98,92
5.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.649.000	97.400.000	98,73
5.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	24.230.000	80,77
5.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.773.000	200.175.000	95,42
5.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	49.958.362	99,92
5.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	3.985.000	72,45
5.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.164.000	39.574.145	98,53
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.942.000	18.880.000	99,67
5.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	18.942.000	18.880.000	99,67
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.341.950	841.087.972	85,01
5.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00
5.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.000.000	224.685.050	70,43
5.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	1.031.300	20,63
5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.341.950	609.371.622	92,42
2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.500.000	291.433.734	92,08
5.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.500.000	163.206.534	87,51
5.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	108.687.200	98,81

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET
1	2	4	5	5
5.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.540.000	97,70
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	133.520.000	122.642.600	91,85
5.2.15.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	46.451.600	92,90
5.2.15.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	83.520.000	76.191.000	91,22
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27.650.080.000	27.157.278.537	98,22
5.2.16.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	39.112.000	78,22
5.2.16.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.952.200.000	26.519.575.137	98,39
5.2.16.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	490.880.000	446.986.650	91,06
5.2.16.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	157.000.000	151.604.750	96,56
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	261.676.000	252.000.500	96,30
5.2.17.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	261.676.000	252.000.500	96,30
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	72.320.000	65.589.000	90,69
5.2.18.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	72.320.000	65.589.000	90,69
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	783.998.000	729.680.440	93,07
5.2.19.05	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000.000	9.937.000	99,37
5.2.19.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	743.998.000	694.919.940	93,40
5.2.19.08	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	12.697.000	84,65

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET
1	2	4	5	5
5.2.19.10	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	12.126.500	80,84
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	597.256.000	569.787.917	95,40
5.2.20.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	507.290.000	494.146.800	97,41
5.2.20.05	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	89.966.000	75.641.117	84,08
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000	40.128.000	80,26
5.2.21.04	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	50.000.000	40.128.000	80,26
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	972.359.000	827.089.500	85,06
5.2.22.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	927.359.000	783.229.500	84,46
5.2.22.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15.000.000	14.160.000	94,40
5.2.22.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30.000.000	29.700.000	99,00
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.040.000	178.133.100	98,94
5.2.23.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.740.000	147.923.100	98,79
5.2.23.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.300.000	30.210.000	99,70
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.230.000	215.675.700	88,67
5.2.25.03	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.230.000	215.675.700	88,67

Lanjutan.				
KODE REKENING	KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET
1	2	4	5	5
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.138.000	3.878.000	93,72
5.2.28.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4.138.000	3.878.000	93,72
2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.770.000	98,47
5.2.37.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.770.000	98,47
2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.219.000	67.999.000	91,62
5.2.58.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	74.219.000	67.999.000	91,62

BAB IV

P E N U T U P

A. Tujuan Umum Keberhasilan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dari target kinerja yang mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

Tingkat keberhasilan dari Indikator Sasaran RPJMD tersebut disimpulkan ketika realisasi angka fatalitas korban kecelakaan di bawah dari target nilai yang ditentukan maka capaian indikator tersebut dikatakan berhasil dan begitu juga sebaliknya, sehingga untuk Capaian Keberhasilan Indikator Sasaran RPJMD pada Tahun 2021 bisa dikatakan berhasil karena realisasi angka fatalitas korban kecelakaan dibawah dari target yaitu 94 kasus/tahun dari target 140 kasus/tahun yang telah ditentukan. Realisasi target capaian tersebut tercapai dengan baik didorong dengan belum maksimalnya mobilisasi masyarakat/ masa transisi mobilisasi masyarakat dikarenakan pandemi covid-19, walaupun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka fatalitas yang tercapai cenderung mengalami kenaikan sekitar 31% yaitu dari 65 kasus/ tahun menjadi 94 kasus/ tahun. Hal ini sangat berpengaruh akibat mulai meningkatnya mobilisasi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran aturan mobilitas masyarakat guna menjaga aktivitas perekonomian masyarakat tetap baik dan produktif baik melalui aktifitas di sektor perdagangan ataupun pariwisata.

Tingginya angka kecelakaan yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara meskipun telah didukung dengan prasarana rambu keselamatan yang bagus dan telah termodernisasikan, oleh sebab itu kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan lebih meningkatkan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung ke lingkungan pendidikan/ sekolah, lingkungan pengusaha angkutan, ataupun kepada masyarakat secara keseluruhan baik melalui sarana edukasi umum seperti halnya fasilitas taman lalu lintas dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kondisi budaya berlalulintas yang berkeselamatan dimana telah terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya berkendara sesuai aturan yang berlaku mengingat untuk tahun 2021 sarana sosialisasi face to face tidak dapat terlaksana sehingga untuk bisa di aktifkan kembali di tahun 2022 yang tentunya selalu mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi covid-19 yang terjadi.

Hal tersebut dapat terlihat dari data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD dengan rincian :

Gambar 22.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2021	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	Kasus	140	94

b. Hasil Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan rincian :

Gambar 23.

SASARAN IKU												
1.	Meningkatnya konektifitas antar wilayah											
2.	Meningkatnya kinerja sarana prasarana transportasi											
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi											
INDIKATOR KINERJA												
1.	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum											
2.	Indeks lalu lintas harian rata-rata (vc ratio)											
3.	Prosentase penurunan angka fatalitas kecelakaan											
NO	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
1.	7%	7,30%	8%	8,06%	9%	9,29%	10%	10,51%	11%	11%	12%	12%
2.	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,63	0,63	0,62	0,43	0,61	0,53
3.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	32%	0,1%	-31%

c. Realisasi pendapatan tercapai 103,26% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.265.215.000,00 tercapai sebesar Rp. 2.338.948.800,00.

d. Realisasi belanja tercapai 96,45% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.37.331.045.950,00 tercapai sebesar Rp. 36.006.367.391,00.

B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- Kesadaran masyarakat akan budaya berlalu lintas berkeselamatan yang masih belum maksimal;
- Sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan yang belum terintegrasi secara optimal;
- Sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat yang belum optimal;
- Tata kelola sarana angkutan yang belum maksimal.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat serta pengelola angkutan jalan dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19;
- Meningkatkan operasi pengendalian dan pengamanan operasional angkutan orang dan barang;

- c. Meningkatkan kajian tata kelola kelalulintasan;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sarana edukasi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kajian tata kelola angkutan umum;
- f. Meningkatkan kelayakan sarana angkutan jalan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 disusun, dengan harapan informasi yang tersaji dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.